

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntan profesional mempunyai peran penting dalam dunia bisnis dan dalam perkembangannya akuntan dapat menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan bisnis telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan akan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang mampu memberikan transparansi agar pelaksanaan kegiatan menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan yang kompleks yang hanya dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar pendidikan tertentu. Salah satu auditor dalam menjalankan profesinya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi publik untuk pengambilan keputusan ekonomi. Seorang auditor mampu dikatakan profesional dilihat dari kinerja yang dilakukannya dalam menjalankan perintah atasan dan sesuai dengan kode etik auditor. Salah satu manfaat auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat

dipercaya dalam pengambilan keputusan. Didalam auditor memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemeriksaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok kegiatan, yaitu audit (konsultasi, asistensi dan evaluasi); pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Christiawan (2002) dalam anggreani (2013) mengemukakan bahwa Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan

pekerjaan mereka pada akuntan publik. Sedangkan menurut Winarna (2005) bagi akuntan publik keharusan memelihara atau mempertahankan sikap mental yang independen dalam rangka memenuhi tanggungjawab profesionalnya bukanlah satu-satunya hal yang esensial akan tetapi kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap independensi akuntan publik juga merupakan hal yang sangat penting.

Mulyadi (2002) dalam Elyawati (2010) mendefinisikan bahwa Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Gaya kepemimpinan menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya (Orchidia, 2014).

Selain itu gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi kinerja auditor pemerintah. Gaya kepemimpinan (*leadership style*) merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Semakin cakapnya seorang pemimpin dalam mengatur/mempengaruhi bawahannya, maka bawahannya akan termotivasi dan bersemangat untuk bekerja, sehingga kualitas kerja (kinerja) bawahannya akan semakin baik (Gustiana, 2014).

Yousef (2000) dalam Arifah (2012) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi memediasi hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja, di mana anggota organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan kinerja mereka menjadi tinggi. Temuan Yousef mendukung hasil penelitian Meyer *et al.* (1989) serta didukung oleh Lok dan Crawford (2004), Fernando *et al.* (2005). Peneliti ingin membuktikan apakah auditor yang komitmen terhadap organisasinya akan mempengaruhi kinerjanya, seperti yang dikemukakan Mayer *et al.* (1989) dan Fernando *et al.* (2005) bahwa hubungan komitmen organisasional (*affective* dan *continuance*) dengan kinerja adalah positif dan kuat, atau mendukung temuan Somers dan Bimbaum (1998) bahwa komitmen organisasional (*affective* dan *continuance*) tidak berhubungan dengan kinerja.

Prajogo (2001) dalam Ichsan (2012) mendefinisikan *Good governance* (GG) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Wilopo (2001) berpendapat bahwa dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Menurut Yuskar (2011) Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi kinerja auditor. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi yang baik akan menciptakan kepuasan kerja karyawan dan berdampak pada kinerja yang lebih baik. Flamholtz (2005) dalam Yuskar (2011) meneliti tentang pengaruh perbedaan elemen budaya terhadap kinerja keuangan dan hasilnya menyatakan bahwa beberapa elemen budaya organisasi mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kinerja

keuangan perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Henry (2006), Boon dan Arumugam (2006) dan hasilnya budaya organisasi mempengaruhi kinerja auditor.

Goldwasser (1993) dalam Afriana (2013) mengungkapkan bahwa Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu yaitu : *Pertama*, kualitas kerja yaitu mutu menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja berdasar pada seluruh kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. *Kedua*, kuantitas kerja yaitu jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor serta kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan. *Ketiga*, ketepatan waktu yaitu ketepatan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sumardi (2002) dalam Adhy (2014) bahwa upaya meningkatkan Kinerja untuk setiap profesi menjadi tema penting bagi organisasi profesi dalam menjaga keberadaan dan kepercayaan masyarakat. Banyaknya kasus penyimpangan keuangan yang berada di bali menyebabkan peran dari BPKP ini sangat dipertanyakan. Mengapa lembaga pengawasan ini belum mampu melaksanakan fungsi dengan baik sehingga penyimpangan itu bisa terjadi, padahal disisi lain pengawasan, pemeriksaan, pembina pengelolaan keuangan daerah adalah tugas pokok dari BPKP. Auditor

BPKP sebagai auditor internal pemerintah harus meningkatkan kinerjanya baik untuk kebutuhan masa kini maupunantisipasi kebutuhan masa yang akan datang.

Terkait dengan penelitian mengenai kinerja auditor sebelumnya, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Elya Wati (2010) yang berjudul “Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan , Komitmen Organisasi, Pemahaman *Good Governance* Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah BPKP perwakilan Bengkulu)”. Peneliti menambahkan variabel budaya organisasi karena budaya organisasi merupakan faktor faktor yang mempengaruhi kinerja auditor (Hanna dan Virnanti, 2013), Sehingga peneliti mengambil judul penelitian “***Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan , Komitmen Organisasi, Pemahaman Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di BPKP Jawa Tengah)***”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
4. Apakah pemahaman *good governance* berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang auditing, dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh



independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi , pemahaman *good governance*, dan budaya organisasi dalam kinerja auditor.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah guna sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sehingga hasil audit dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

### b) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, diharapkan agar untuk menambah wawasan dan cakrawala berfikir mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah

### c) Bagi akademisi

Hasil penelitian ini, diharapkan agar dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada.

## E. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha

mencantumkan secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya.

Adapun sistematika skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi teori artibusi, independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, pemahaman *good governance*, budaya organisasi dan kinerja auditor. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukuran metode analisis data.

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PENGEMBANGAN

Bab ini berisi gambaran umum penelitian hasil analisis data dan pembahasannya.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya.